

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aulia Pohan, 2008, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Aulia Pohan, 2011, *Sistem Pembayaran strategi dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Daniel Yusmic, 2021, *perpu dalam teori dan praktik*, PT. RajaGrafindo Persada., Depok.
- Eduardus Tandellin. 2010. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Efendi. Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Emmy Pengaribuan Simanjuntak. 1993. *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Faniyah. 2018. *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia*. Budi Utama. Yogyakarta.
- J Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- J. W Creswell. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (ed keempat)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Dua Tipe Perpu. Pembentukan Dan Pencabutannya*.
- Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prendamedia Group. Jakarta.
- Neni Sri Imaniyati. Panji Adam Agus Putra. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT Refika Aditama. Jakarta.
- Perry Warjiyo, 2017, *Kebijakan Moneter Di Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia., Jakarta.

Purwosutjipto. 2000. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 (Hukum Surat Berharga)*. Djambatan. Jakarta.

Sentosa Sembiring. 2016. *Hukum Surat Berharga*. Nuansa Aulia. Bandung.

Soerjono Soekonto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Jurnal:

H. Heru Soeprapto. "Segi-Segi Hukum Obligasi". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 23. No. 1. 2004.

Khavid Normasyhuri. dkk. "Dampak Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volumen 8. No. 1. 2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

Internet :

Abdul Azis Said (Katadata.co.id). Bantu Biayai APBN. BI Sudah Borong Surat Utang Pemerintah Rp 124 T. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/610cd29a88f1c/bantu-biayai-apbn-bi-sudah-borong-surat-utang-pemerintah-rp-124-t>. Diakses pada tanggal 1 April 2022. pukul 10.00 WITA.

Corona Virus Live Update, diakses dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 10.20.

<https://nasional.kontan.co.id/news/gubernur-bi-beberkan-mengapa-neraca-keuangan-bi-pada-2021-diprediksi-defisit> Di akses pada Tanggal 24 Februari 2020 pukul 15.09.

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/Sosialisasi%20SBN/YARS%20-%20SUN%20Ritel.pdf> Diakses pada 4 September Pukul 12.40

Indonesia. Bank."Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi" yang diunggah oleh Bank Indonesia. 3 Desember 2020. https://www.youtube.com/watch?v=Bb6gWgVBB_s. Di akses pada Tanggal 23 Februari 2020 pukul 14.22.

Iwan Purwantono (Inilah.com). Setelah Ingatkan Utang Era Jokowi Mengkhawatirkan. IMF Tegurs BI Setop Belanja SUN. <https://www.inilah.com/setelah-ingatkan-utang-era-jokowi-menggunakan-kini-imf-tegur-bi-setop-belanja-sunpemerintah-jadi-anak-manja-imf-ingatkan-bi-setop-borong-sun-hingga-rp831-t>. Diakses pada tanggal 12 April 2022. pukul 10.00 WITA. dan Bidara Pink (Kontan.co.id). IMF Beberkan Risiko Pembelian Surat Utang Pemerintah Oleh Bank Sentral. **Error! Hyperlink reference not valid..** Diakses pada tanggal 12 April 2022. pukul 10.00 WITA.

Kebanksentralan, di akses dari [https://disdik.kalteng.go.id/materibi/Materi%20Kebanksentralan%20\(1\).pdf](https://disdik.kalteng.go.id/materibi/Materi%20Kebanksentralan%20(1).pdf) di akses pada 29 jan 21 17:50.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kembali Tetapkan SKB. Pemerintah dan BI Koordinasikan Pembiayaan Penanganan Covid-19. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kembali-tetapkan-skb-pemerintah-dan-bi-koordinasikan-pembiayaan-penanganan-covid-19/>. Diakses pada tanggal 12 April 2022. pukul 10.00 WITA.

Kementrian Keuangan.”press conference langkah penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak COVID-19” pada Tanggal 3 Desember 2020 pukul 15.25.

Mengenal SUN, di akses dari <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/uploads/files/dmodata/in/6Publikasi/5Brosur/Mengenal%20SUN.pdf> di akses pada 29 jan 2020 18:32.

Pemerintah Terbitkan PERPPU untuk Tangani Dampak Ekonomi Akibat COVID-19, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-terbitkan-perppu-untuk-tangani-dampak-ekonomi-akibat-COVID-19/> di akses pada 3 feb 2020 10:20

Siti Masitoh (Kontan.co.id). Bantu Pemulihan Ekonomi. BI Kembali Membeli Surat Utang Pemerintah. <https://nasional.kontan.co.id/news/bantu-pemulihan-ekonomi-bi-kembali-membeli-surat-utang-pemerintah>. Diakses pada tanggal 1 April 2022 pukul 10.00 WITA.

Wawancara :

Wawancara kepada Muhammad Rasyidi selaku Staf Bank Indonesia pada Departemen Kebijakan Makro Prudensial pada tanggal 10 Januari 2022.

Wawancara kepada H.M. Djafar Saidi selaku Dosen Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 25 Mei 2020.

Wawancara kepada Muhammad Zulfan Hakim selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 25 Mei 2020.